

**PERAN *STAKEHOLDERS* DALAM PENGELOLAN EKOWISATA MANGROVE
TAPAK, KOTA SEMARANG**

Dea Friska Krisyania, Prof. Dr. Dra. Sri Suwitri, M.Si.

**Program Studi S1 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Email: fisip@undip.ac.id**

ABSTRACT

The management of Mangrove Tapak Ecotourism in Semarang City faces various challenges. Therefore, stakeholders play an important role in the management of Mangrove Tapak Ecotourism. This study aims to analyze the roles of stakeholders in the management of Mangrove Tapak Ecotourism, Semarang City, as well as to identify and analyze the supporting and inhibiting factors affecting stakeholders' roles in its management. This research employs a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation studies. The results indicate that stakeholders have implemented various strategies in the management of Mangrove Tapak Ecotourism, Semarang City, including the optimization of sustainable coastal resource and environmental utilization, preservation of coastal resource and environmental functions, consideration of regional conditions and potentials as well as local wisdom, and the development of community participation, empowerment, and partnerships. The supporting factors for stakeholders' roles include conservation policy support, rehabilitation programs and infrastructure, assistance, promotion, as well as coordination and supervision among relevant parties. Meanwhile, the inhibiting factors include limitations in authority and funding of local governments, suboptimal regulations and policy understanding, limited human resources, and the absence of clear mechanisms for cooperation and structured management. An important finding of this study is that policy creators play a minor role in the management of Mangrove Tapak Ecotourism, Semarang City. This is due to policies having limited impact and the managers' understanding of policies being merely normative in nature.

Keywords: Stakeholders Roles, Management, Tapak Mangrove Ecotourism, Policy Creator, Community Empowerment

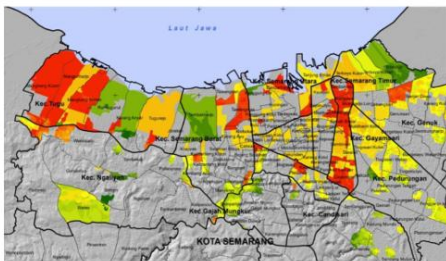
ABSTRAK

Pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak, Kota Semarang menghadapi berbagai permasalahan. Oleh karena itu, para stakeholders mempunyai peran dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak, Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran stakeholders dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak, Kota Semarang, serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat peran stakeholders dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak, Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan stakeholders telah melakukan berbagai strategi dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak, Kota Semarang, meliputi: optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan lingkungan pesisir secara berkelanjutan, pelestarian fungsi sumberdaya dan lingkungan pesisir, kondisi potensi daerah serta kearifan lokal dan pengembangan peran serta dan pemberdayaan masyarakat serta kemitraan. Faktor pendukung peran stakeholders adalah dukungan kebijakan konservasi, program rehabilitasi dan infrastruktur, pendampingan, promosi, serta koordinasi dan pengawasan antar pihak terkait. Faktor penghambat peran stakeholders meliputi keterbatasan kewenangan dan pendanaan pemerintah daerah, belum optimalnya regulasi dan pemahaman kebijakan, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum jelasnya mekanisme kerja sama dan pengelolaan yang terstruktur. Temuan penting yaitu policy creator berperan minor dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak, Kota Semarang. Hal ini karena kebijakan kurang berdampak dan pemahaman pengelola terhadap kebijakan bersifat normatif.

Kata kunci: Peran *stakeholders*, Pengelolaan, Ekowisata Mangrove Tapak, Policy Creator, Pemberdayaan Masyarakat

PENDAHULUAN

Ekosistem mangrove di wilayah pesisir Kota Semarang mengalami degradasi yang signifikan akibat kombinasi tekanan alam dan aktivitas manusia. Berdasarkan data Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang hanya memiliki luas mangrove sekitar 62,9 ha, sementara tingkat abrasi mencapai 342,67 ha dan sedimentasi sebesar 318,74 ha, yang menunjukkan tingginya kerentanan pesisir terhadap banjir rob dan abrasi.



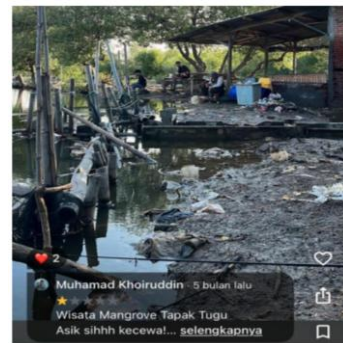
Gambar 1. Daftar Daerah Rawan Banjir di Kota Semarang

Sumber: Berita Samudra Fakta (2024)

Kecamatan Tugu, sebagai salah satu wilayah pesisir Kota Semarang, diklasifikasikan sebagai kawasan dengan tingkat bahaya banjir dan abrasi tinggi, dengan luas potensi banjir mencapai lebih dari 2.200 ha serta potensi abrasi hingga 147,34 ha. Kondisi ini secara langsung mengancam keberlanjutan ekosistem mangrove dan kehidupan masyarakat pesisir.

Permasalahan tersebut tampak jelas di Ekowisata Mangrove Tapak, Kelurahan Tugurejo. Sungai Tapak yang mengalir kawasan mangrove telah tercemar limbah domestik dan industri, ditunjukkan oleh nilai *Biological Oxygen Demand* (BOD) sebesar 24 mg/L, *Chemical Oxygen Demand* (COD)

sebesar 50,71 mg/L, serta total coliform mencapai 16.000.000, yang menandakan kualitas air berada jauh di bawah baku mutu lingkungan. Selain pencemaran air, kawasan Mangrove Tapak juga menghadapi permasalahan sampah, yang terlihat dari penumpukan sampah di aliran sungai dan area mangrove serta keluhan pengunjung yang terekam dalam ulasan *Google Maps*.



Gambar 2. Review Tumpukan Sampah di Ekowisata Mangrove Tapak
Sumber: Google Maps (2025)

Kondisi ini menunjukkan rendahnya pengelolaan kebersihan dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian kawasan ekowisata.

Tekanan lain berasal dari alih fungsi lahan dan kepemilikan lahan oleh pihak swasta. Data menunjukkan bahwa luas kawasan industri di Kecamatan Tugu meningkat dari 42,317 ha pada tahun 2018 menjadi 59,75 ha pada tahun 2019, sementara luas lahan tambak justru menurun. Berikut di bawah ini merupakan daftar mata pencaharian penduduk Dusun Tapak per September 2025 yang menunjukkan adanya pengaruh dari industri terhadap mata pencaharian yang ada di Susun Tapak.

Tabel 1. Mata Pencanharian Penduduk Dusun Tapak per September 2025

No	Mata Pencanharian	Jumlah Orang
1.	Petani	100
2.	Buruh tani	294
3.	Nelayan	10
4.	Pengusaha	289
5.	Buruh Industri	2.403
6.	Buruh Bangunan	217
7.	Pedagang	58
8.	Pengangkutan	3
9.	Pegawai Negeri (Sipil/ABRI)	154
10.	Pensiunan	32
11.	Lain-lain (Jasa)	4.505
Jumlah		8.065

Sumber: Monografi Kelurahan Tugurejo (2025)

Perubahan ini mendorong penjualan lahan oleh masyarakat kepada pihak industri dan menggeser mata pencaharian warga pesisir. Diketahui buruh industri mencapai 2.403 orang yang menunjukkan tingginya mata pencaharian buruh industri pada Dusun Tapak.



Gambar 3. Rencana Pembangunan Jalan Tol (PSN) Kota Semarang
Sumber: Perda Kota Semarang No 4 Tahun 2024

Selain itu, keberadaan Kawasan Industri Wijayakusuma seluas ± 250 ha di sekitar Ekowisata Mangrove Tapak, serta aktivitas reklamasi dan pembangunan industri di wilayah pesisir Kendal, turut memperparah tekanan ekologis melalui abrasi, pencemaran, dan perubahan garis pantai.

Kompleksitas permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Ekowisata

Mangrove Tapak membutuhkan keterlibatan berbagai stakeholders. Namun, keterbatasan kewenangan, pendanaan, lemahnya koordinasi, serta rendahnya kesadaran masyarakat menyebabkan peran stakeholders dalam pengelolaan ekowisata mangrove belum berjalan optimal, sehingga diperlukan kajian mendalam untuk memperkuat pengelolaan ekowisata mangrove yang berkelanjutan.

KAJIAN TEORI

1. Peran Stakeholders menurut Wahyuningtyas dan Iskandar (2023)

- Policy creator:** *stakeholders* berperan dalam merumuskan kebijakan, regulasi, dan arah strategis pengelolaan yang menjadi dasar pelaksanaan program serta pedoman bagi aktor lain.
- Implementer:** *stakeholders* bertanggung jawab melaksanakan kebijakan dan program melalui kegiatan operasional, pengelolaan sumber daya, serta pengawasan teknis di lapangan.
- Fasilitator:** *stakeholders* menyediakan dukungan berupa pendampingan, sarana dan prasarana, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendorong kolaborasi antar pihak.
- Konservator:** *stakeholders* berperan menjaga, melindungi, dan melestarikan sumber daya serta lingkungan secara berkelanjutan sebagai bentuk tanggung jawab ekologis jangka panjang

2. Peran Stakeholders menurut Mathis

(dalam Pramesti dkk., 2024)

- a. Regulator: pihak yang memiliki kewenangan dalam merancang dan menetapkan kebijakan atau peraturan yang berkaitan dengan pengembangan destinasi wisata.
- b. Fasilitator: pihak yang berperan memberikan bantuan, dukungan, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat guna mendukung pencapaian tujuan pengembangan pariwisata.
- c. Pelaksana/Pengelola: pihak yang bertugas menjalankan sekaligus mengelola destinasi wisata secara langsung agar kegiatan pariwisata dapat berjalan secara efektif.

3. Peran Stakeholders menurut Nugroho (2014)

- a. Policy creator: pihak yang berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan strategis sebagai arah pelaksanaan program atau kegiatan.
- b. Koordinator: pihak yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengharmoniskan peran antar stakeholders.
- c. Fasilitator: pihak yang menyediakan dukungan, sumber daya, dan kemudahan bagi pelaksana kebijakan.
- d. Implementor: pihak yang melaksanakan kebijakan atau program secara langsung di lapangan.

- e. Akselerator: pihak yang mendorong percepatan pencapaian tujuan melalui inovasi dan terobosan pelaksanaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis peran stakeholders dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan informan yang dipilih secara purposive dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan kawasan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengacu pada sintesis teori peran stakeholders, meliputi peran policy creator, implementer, fasilitator, dan koordinator serta validasi data melalui triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Stakeholders dalam Pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak, Kota Semarang

Peran Policy Creator

Stakeholders pemerintah berperan sebagai policy creator melalui penyusunan kebijakan, regulasi, dan program yang berkaitan dengan konservasi mangrove dan pengembangan ekowisata. Kebijakan tersebut menjadi dasar dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak, namun implementasinya di tingkat Tapak belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kewenangan, alokasi anggaran, serta belum adanya

kebijakan yang secara spesifik mengatur pengelolaan ekowisata mangrove secara terpadu, sehingga kebijakan yang ada cenderung bersifat normatif.

Peran Implementer

Peran implementer dijalankan oleh kelompok pengelola dan masyarakat lokal melalui pelaksanaan kegiatan pengelolaan ekowisata dan rehabilitasi mangrove. Implementasi dilakukan dalam bentuk penanaman mangrove, pengelolaan fasilitas wisata, serta pemeliharaan kawasan. Meskipun peran ini menunjukkan keterlibatan aktif masyarakat, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, pendanaan, dan dukungan teknis, yang berdampak pada belum optimalnya kualitas dan keberlanjutan pengelolaan ekowisata.

Peran Fasilitator

Stakeholders berperan dalam memberikan pendampingan, pelatihan, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung bagi pengelola dan masyarakat. Peran ini mendorong peningkatan kapasitas pengelola serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekowisata mangrove. Namun demikian, fasilitasi yang diberikan belum berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan, karena masih bergantung pada program atau kegiatan tertentu.

Peran Koordinator

Peran koordinator dijalankan untuk menyelaraskan kepentingan dan memperkuat sinergi antar *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak. Dalam praktiknya, koordinasi antar pemerintah, pengelola, masyarakat, dan pihak terkait lainnya masih belum terintegrasi secara optimal dan cenderung bersifat sektoral. Kondisi ini menyebabkan penanganan berbagai permasalahan lingkungan dan pengelolaan ekowisata belum dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

Faktor Pendorong dan Penghambat Peran *Stakeholders* dalam Pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak, Kota Semarang

Peran Policy Creator

Faktor pendorong peran policy creator ditunjukkan melalui adanya komitmen pemerintah dalam mendukung konservasi mangrove dan pengembangan ekowisata, yang tercermin dalam kebijakan lingkungan, program rehabilitasi mangrove, serta dukungan perencanaan pembangunan wilayah pesisir. Namun, peran ini masih dihambat oleh keterbatasan kewenangan lintas sektor, minimnya alokasi anggaran khusus, serta belum adanya regulasi yang secara spesifik mengatur pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak secara terpadu. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas

permasalahan di tingkat Tapak.

Peran Implementer

Peran implementer didorong oleh keterlibatan aktif kelompok pengelola dan masyarakat lokal yang memiliki kepedulian terhadap kelestarian mangrove dan keberlanjutan ekowisata. Kegiatan operasional seperti pengelolaan wisata, penanaman mangrove, dan pemeliharaan kawasan menjadi bentuk nyata peran ini. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, pendanaan yang tidak berkelanjutan, serta tekanan eksternal seperti pencemaran limbah, sampah, abrasi, dan banjir rob yang memperberat upaya pengelolaan.

Peran Fasilitator

Faktor pendorong peran fasilitator terlihat dari adanya pendampingan, pelatihan, dan penyediaan sarana prasarana yang mendukung aktivitas pengelolaan ekowisata mangrove. Fasilitasi ini berkontribusi pada peningkatan kapasitas pengelola dan partisipasi masyarakat. Namun demikian, peran fasilitator masih dihambat oleh keterbatasan intensitas pendampingan, ketergantungan pada program tertentu, serta belum meratanya dukungan teknis dan akses sumber daya yang dibutuhkan untuk pengelolaan jangka panjang.

Peran Koordinator

Peran koordinator didorong oleh

adanya kebutuhan untuk menyatukan kepentingan berbagai *stakeholders* dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak. Upaya koordinasi dilakukan untuk membangun sinergi antar pemerintah, pengelola, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Akan tetapi, peran ini masih terhambat oleh lemahnya mekanisme koordinasi formal, komunikasi antar pihak yang belum efektif, serta pendekatan pengelolaan yang masih bersifat sektoral. Kondisi tersebut menyebabkan penanganan permasalahan lingkungan dan pengelolaan ekowisata belum berjalan secara terpadu dan optimal.

Berdasarkan hasil dan pembahasan, faktor pendorong dan penghambat peran *stakeholders* dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sangat ditentukan oleh keseimbangan antar peran *policy creator*, *implementer*, *fasilitator*, dan *koordinator*. Peran *policy creator* didorong oleh adanya komitmen kebijakan dan program konservasi mangrove, namun terhambat oleh keterbatasan kewenangan, anggaran, serta belum adanya regulasi yang spesifik dan terintegrasi. Peran *implementer* diperkuat oleh partisipasi aktif masyarakat dan kelompok pengelola, tetapi masih terkendala oleh keterbatasan kapasitas sumber daya, pendanaan, serta tekanan permasalahan lingkungan. Peran *fasilitator* didukung oleh adanya pendampingan dan

penyediaan sarana prasarana, namun belum berjalan optimal akibat keterbatasan intensitas dan keberlanjutan fasilitasi. Sementara itu, peran *koordinator* didorong oleh kebutuhan akan sinergi antar stakeholders, tetapi terhambat oleh lemahnya mekanisme koordinasi dan komunikasi yang masih bersifat sektoral. Secara keseluruhan, penguatan sinergi antar peran dan peningkatan kapasitas stakeholders menjadi kunci untuk mengoptimalkan pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pengelolaan Ekowisata Mangrove Tapak, Kota Semarang melibatkan peran stakeholders sebagai *policy creator*, *implementer*, *fasilitator*, dan *koordinator* yang dijalankan melalui berbagai strategi, seperti pemanfaatan sumber daya pesisir secara berkelanjutan, pelestarian fungsi lingkungan, penguatan kearifan lokal, serta pengembangan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat berbasis kemitraan. Implementasi peran tersebut telah diwujudkan melalui kegiatan rehabilitasi mangrove, pengembangan UMKM dan paket wisata, pendampingan dan pelatihan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Namun, pelaksanaannya belum optimal akibat pemahaman kebijakan yang masih normatif, regulasi yang belum kontekstual dengan kebutuhan

lapangan, serta berbagai tekanan eksternal seperti pencemaran industri, alih kepemilikan lahan pesisir, kepentingan sektoral, dan keterbatasan sumber daya. Faktor pendukung pengelolaan meliputi kebijakan konservasi, dukungan pendampingan, promosi ekowisata, pembangunan infrastruktur, dan koordinasi antar-*stakeholders*, sementara faktor penghambat utamanya adalah lemahnya dampak kebijakan di tingkat tapak dan tekanan lingkungan yang berkelanjutan.

SARAN

- a. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang perlu meningkatkan kinerja pengawasan lingkungan melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.
- b. Pemerintah Daerah perlu memperkuat perannya sebagai *policy creator* melalui penyusunan kebijakan yang lebih kontekstual dan aplikatif terhadap kondisi Ekowisata Mangrove Tapak. Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun regulasi turunan dan SOP teknis pengelolaan ekowisata mangrove yang memuat pembagian peran antar stakeholder, standar 189 pengelolaan kawasan, serta mekanisme koordinasi lintas sektor.
- c. Pengelolaan kawasan pesisir perlu dilaksanakan secara terpadu melalui koordinasi dan keterlibatan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan

kolaborasi seluruh *stakeholders* di Kota Semarang guna mengoptimalkan potensi pesisir dengan dukungan dan kepedulian yang lebih kuat dari pemerintah serta pihak terkait.

- d. Penguatan mekanisme penyampaian kebutuhan dan aspirasi masyarakat melalui jalur perencanaan formal, khususnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang dimulai dari tingkat RT, dilanjutkan ke RW, kelurahan, kecamatan, pemerintah kota, hingga provinsi agar kebutuhan riil di wilayah dapat diketahui dan ditindaklanjuti oleh para pemangku kebijakan.
- e. Pemerintah Kota Semarang melalui Bappeda, Dinas Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Kelautan dan Perikanan perlu melakukan penegasan dan sinkronisasi kebijakan pengelolaan lahan pesisir dengan menyusun peta status dan peruntukan lahan pesisir yang terintegrasi, khususnya di kawasan Ekowisata Mangrove Tapak. Penegasan ini perlu dituangkan dalam regulasi teknis dan SOP pemanfaatan lahan pesisir yang mengatur batasan aktivitas industri, reklamasi, dan pengelolaan ekowisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, R. (2023). *Perkembangan Teori Administrasi Publik*. Deepublish.
- Ardiansyah, I. (2021). Analisis Stakeholder dalam Pengembangan Ekowisata di Taman Wisata Alam Gunung Pancar Kabupaten Bogor. *Eduturisma*, 6(1), 1-8.
- Blanton, A., Ewane, E. B., McTavish, F., Watt, M. S., Rogers, K., Daneil, R., ... & Mohan, M. (2024). Ecotourism and mangrove conservation in Southeast Asia: Current trends and perspectives. *Journal of Environmental Management*, 365, 121529.
- Das, C. S., Mallick, D., & Mandal, R. N. (2020). Mangrove Forests in Changing Climate: A Global Overview. *Journal of the Indian Society of Coastal Agricultural Research*, 38(2).
- Dokumen Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-API) Kota Semarang (2019)
- Djani, W. (2022). *Administrasi Publik (teori dan pergeseran paradigma ke era digital)*. Zifatama Jawa.
- Hildawati, H., Erlianti, D., Mursalim, S. W., Fallz, I., Puspadewi, E., Sintari, S. N. N., & Islah, K. (2024). *Buku Ajar Teori Administrasi Publik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Jannata, F. M., Marom, A., & Nurcahyanto, H. (2023). Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Pariwisata Di Desa Wisata Jatirejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(4), 762-776.
- Kalsum, U., Purwanto, R. H., WF, L. R., & Sumardi, S. (2022). Peran Stakeholder Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Luwuk Timur Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil*, 6(1), 83-93.
- Kamal, M. (2025). Sedekah Laut Mangunharjo Didorong Jadi Agenda Wisata Budaya Semarang. *Jatengnews.id*.
<https://www.jatengnews.id/2025/07/22/sedekah-laut-mangunharjo-didorong-jadi-agenda-wisata-budaya-semarang/>

- (diakses tanggal 19 Desember 2025)
- Leo-Olagbaye, F., Odeyinka, H., & Rathnasiri, P. (2023). Stakeholders' Roles in the Delivery of Sustainable Housing Projects in Lagos State, Nigeria. *Sustainability*, 15(15), 11709.
- Machado, J. G., Buccini, G., & Recine, E. (2023). An Analysis of key actor networks for scale-up strategies for childhood obesity prevention and the care of children with obesity in Brazil. *Current Developments in Nutrition*, 7(7), 101961.
- Masyhurah, M., Yuniningsih, T., & Dwimawanti, I. H. (2021). ANALISIS PERAN STAKEHOLDER DALAM KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI KOTA SEMARANG. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(2), 578-597.
- Meutiasari, N. K. A., Kismartini, K., & Hanani, R. (2024). URGENSI PERAN STAKEHOLDERS DALAM PENGELOLAAN SAMPAH. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(2), 1-11.
- Mirza, M., Anggoro, S., & Muhammad, F. (2022). Strategi Pengembangan Ekowisata Mangrove Pesisir Tapak Kelurahan Tugurejo, Semarang, Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 20(4), 806-815.
- Mukhlisi, M. (2017). Potensi Pengembangan Ekowisata Mangrove Di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau (Potential Development of Mangrove Ecotourism in Tanjung Batu Village, Derawan Island District, Berau Regency). *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, 24(1), 23-30.
- Mulyawan, R., Wahjunie, E. D., Ichwandi, I., & Tarigan, S. D. (2022). Kajian peran stakeholder pada implementasi kebijakan pengelolaan DAS terpadu, studi kasus DAS Krueng Aceh. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 20(2), 198-209.
- Nina. (2025). Pendampingan Olahan Mangrove dan Edukasi Konservasi di Tapak Tugu, Semarang. Kompasiana. https://www.kompasiana.com/tehnina0468/68ca80fbc925c4395c39b494/pendampingan-olahan-mangrove-dan-edukasi-konservasi-di-tapak-tugu-semarang?page=1&page_images=2 (diakses tanggal 19 Desember 2025).
- Nugroho, A. Y., Rahman, A. Z., & Kismartini, K. (2022). Peran Stakeholders dalam Pengembangan Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(2), 315-335.
- Nugroho, H. C., Zauhar, S., & Suryadi, S. (2014). Koordinasi pelaksanaan program pengembangan kawasan agropolitan di kabupaten Nganjuk. *Jurnal Pembangunan Dan Alam Lestari*, 5(1).
- Pramesti, R., Kismartini, & Suwitri, S. (2024). Peran Aktor Dalam Pengembangan Wisata Kampung Pelangi di Kelurahan Randusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 13.
- Rachma, N., Kismartini, K., & Hanani, R. (2023). PERAN STAKEHOLDERS DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KECAMATAN SEMARANG BARAT. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(4), 450-468.
- Rintawati, R. A., & Santoso, R. S. (2024). ANALISIS PERAN STAKEHOLDERS DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA MUSEUM DAN MONUMEN PALAGAN AMBARAWA DI KABUPATEN SEMARANG. *Journal of Public Policy and Management Review*, 1(1), 282-300.
- Roosinda, F. W., Lestari, N. S., Utama, A. G. S., Anisah, H. U., Siahaan, A. L. S., Islamiati, S. H. D., ... & Fasa, M. I. (2021). Metode penelitian kualitatif. Zahir Publishing.
- Roxas, F. M. Y., Rivera, J. P. R., & Gutierrez, E. L. M. (2020). Mapping stakeholders'

- roles in governing sustainable tourism destinations. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 45, 387-398.
- Setiawan, B., & Nurcahyanto, H. (2020). Analisis Peran Stakeholders dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Angka Kematian Ibu Studi Kasus Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(2), 127-144.
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development*. New York: UNDP.
- Xu, L., Ao, C., Liu, B., & Cai, Z. (2023). Ecotourism and sustainable development: a scientometric review of global research trends. *Environment, Development and Sustainability*, 25(4), 2977-3003